

**DINAMIKA PESANTREN MUHAMMADIYAH DAN
NAHDLATUL ULAMA DI KAWASAN PESISIR
DAN PEDALAMAN PANTAI UTARA
KABUPATEN LAMONGAN**

Isa Anshori (Dosen Universitas Muhammadiyah Sidoarjo)
Jl. Mojopahit 666 B Sidoarjo 61271 Tlp. (031) 8945444-8928097
Hp. 081330607967
Email : isa_umsida67@yahoo.com

ABSTRAK

Faktor eksternal terutama kebijakan pemerintah tentang reformasi pendidikan dan kehadiran para pemilik kapital di sekitar pesantren memiliki kontribusi bagi terjadinya dinamika ideologi, kelembagaan dan ekonomi di pesantren Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang ada di kawasan pesisir dan pedalaman pantai utara kabupaten Lamongan, namun yang paling dominan adalah faktor internal, yakni figur kiai yang bersinergi dengan para ahli di Yayasan Pesantren. Dalam hal ini, ada kiai yang hanya mengambil satu jalan ideologis, namun ada pula kiai yang menggunakan jalan ketiga, yakni antara ideologis dengan realistik (kemaslahatan ummat). Dilihat dari hubungan pesantren dengan Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama, ada pesantren "persyarikatan" atau "jamiyah", ada pesantren "penyangga", ada pesantren "penyumbang" dan ada pula pesantren "penganut". Empat tipologi tersebut dimiliki oleh Muhammadiyah, sedangkan Nahdlatul Ulama hanya memiliki pesantren "penyumbang" dan "penganut". Implikasi teoritis, temuan ini menyempurnakan teori "Strukturasi" dan "The Third Way" Giddens, menolak teori "Hegemoni" Gramsci dan teori "Cuercy" Louis Althusser.

Kata kunci: Dinamika Pesantren, Kebijakan Pemerintah, Penetrasi Kepemimpinan Kiai

**THE DYNAMIC OF PESANTREN MUHAMMADIYAH AND NAHDATUL
ULAMA IN COASTAL AND INLAND NORTHEN BEACH AREA
OF LAMONGAN REGENCY**

ABSTRACT

External factors, especially of government policy on education reform and the presence of the owners of capital in schools has contributed to the dynamics of ideology, institutional and economic development in Muhammadiyah and NU pesantren in coastal and inland northern Lamongan beach area, but the most dominant is internal factor, that is the cooperation of Kyai's figure and the experts in Islamic School foundation. In this case, there is kiai who only takes one ideological path, but there is also a Kiai who use a third way, namely the ideological with the realistic (well-being of the ummah). It can be seen from the relationship with Muhammadiyah schools or NU, there are boarding "Persyarikatan" or "Jamiyah", there are boarding "buffer", there are boarding "contributor" and some are boarding "believer". Four typologies are owned by the Muhammadiyah, NU has only while boarding "contributor" and "followers". The theoretical implications, these findings refine the theory of "Structuration" and "The Third Way" Giddens, rejected the theory of "hegemony" and the theory Gramsci "Cuercy" Louis Althusser.

Keywords: Dynamics Boarding School, Government policy, Penetration Leadership of Kiai

A. Pendahuluan

Masa reformasi merupakan momen penting bagi terjadinyadinamika pesantren di perdesaan, baik dibidang sosial, ideologi, maupun ekonomi. Pada awal kedatangan Islam (Abad 12 dan 13 M) terutama dimasa Walisongo, serta era penjajahan Belanda, zaman kemerdekaan, Orde Lama hingga Orde Baru, pesantren merupakan bagian dari masyarakat perdesaan yang tumbuh dan berkembang dari desa. Namun dimasa Reformasi, banyak pesantren yang tidak lagi sepenuhnya menjadi bagian dari masyarakat perdesaan.

Dinamika pesantren tersebut terjadi karena adanya modernisasi ekonomi, reformasi pendidikan, dan terbukanya peluang kerja di luar negeri. Modernisasi ekonomi di tanah air memang sudah terjadi sejak masa Orde Baru. Namun, dampaknya sangat terasa terutama sejak masa Reformasi. Banyak kawasan perdesaan, termasuk yang berdekatan dengan pesantren, berubah fungsinya dari pertanian menjadi industri dan jasa.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa dinamika pesantren di Indonesia sudah terjadi sejak awal abad ke-19 dan terus berlangsung hingga sekarang. Misalnya penelitian Karel A. Steenbrik (tahun 1973-1974)¹ menemukan dualisme pendidikan di pesantren (sekolah dan Madrasah). Penelitian terkini (2009) dilakukan oleh Asrori S. Karni² membuktikan dinamika pesantren ditandai dengan gejala makin besarnya peran negara dan meng-geser peran masyarakat.

Penelitian Asrori S. Karni meng-indikasikan kebenaran teori Gramscy dan Louis Althusser. Gramscy menyatakan bahwa negara punya peran besar dalam meng-gerakkan pesantren. Bahkan,

menjadikan kiai sebagai tokoh yang digunakan alat untuk menguasai masyarakat. Louis Althusser menjadikan ideologi sebagai alat negara untuk menguasai masyarakat. Dalam hal ini, pesantren dijadikan alat negara. Melalui pendidikan di pesantren, maka ideologi bisa ditanamkan kepada para santri. Baik Gramscy maupun Louis Althusser menyatakan bahwa individu tidak bebas dan justru dikuasai oleh struktur, yakni negara. Akibatnya, negara dapat melanggengkan kekuasaannya. Berbeda dengan Giddens yang menempatkan individu dan struktur berupa aturan dan sumber daya bisa saling mempengaruhi sehingga mendorong terjadinya dinamika pesantren.

Tampaknya, Gramscy dan Louis Althusser lebih melihat faktor eksternal pesantren yang mendorong terjadinya dinamika pesantren. Sedangkan Giddens lebih melihat faktor internal. Perdebatan-perdebatan teoritis seperti ini yang kami jabarkan dalam pembahasan dinamika pesantren Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di kawasan pesisir pantai utara dan pedalaman Kabupaten Lamongan.

Dipilihnya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama karena mayoritas masyarakat di pantai utara Kabupaten Lamongan ber-paham keagamaan dari dua organisasi tersebut. Demikian halnya pesantren beserta kiai dan santri, serta perangkat desa. Setting dipilih perdesaan pesisir dan pedalaman di pantai utara Kabupaten Lamongan, karena di kawasan ini tumbuh berbagai pesantren Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang memiliki basis santri yang relatif sama besar. Mungkin sebuah realitas sosial yang tidak dimiliki oleh

1) Karel A. Steenbrik, *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern* (Jakarta: LP3ES, 1994), xiii-xiv.

2) Asrori S. Karni, *Etos Studi Kaum Santri: Wajah Baru Pendidikan Islam*, (Jakarta: Mizan, 2009), -xxxix

kabupaten lain di Indonesia.

Persoalannya kemudian : benarkah yang mendorong terjadinya dinamika pesantren Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di kawasan pesisir dan pedalaman pantai utara Kabupaten Lamongan adalah faktor internal, yakni kiai sebagai agen sosial? Atau justru faktor eksternal, yakni kebijakan pemerintah tentang pendidikan dan pembangunan, serta perubahan-perubahan sekitar pesantren? Paparan berikut bertujuan untuk mengungkap kondisi riil dinamika masyarakat pesisir dan pedalaman di pantura Kabupaten Lamongan, faktor pendorong terjadinya dinamika pesantren Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, tipologi kiai dan pesantren Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, serta dinamika pesantren dalam perspektif teori Giddens, Gramsci dan Louis Althusser. Aspek sosial, ideologi, dan ekonomi dipilih mengingat ketiga aspek ini yang tampak dominan -tanpa menutupi kemungkinan aspek politik- untuk dijadikan dasar menentukan tipologi kiai dan pesantren. Merupakan hasil penelitian selama 20 bulan (dari Januari 2010 hingga Agustus 2011), menggunakan metode kualitatif dengan kerangka pemikiran Gramsci, Louis Althusser dan Giddens.

B. Kajian Teoritik

Dinamika pesantren merupakan pergeseran, perubahan atau perkembangan yang terus berlangsung di pesantren yang bersifat fluktuatif dan bisa terjadi dalam bidang sosial, ideologi, maupun ekonomi.

Dinamika sosial pesantren merupakan gerak kemajuan sosial di pesantren berupa terjadinya pergeseran, perubahan, atau perkembangan pesantren sebagai

institusi pendidikan dan institusi kemasyarakatan. Sebagai institusi pendidikan, pesantren mengalami pergeseran-pergeseran menyangkut kurikulum, jenis pendidikan, dan manajemen pengelolaan. Sebagai institusi kemasyarakatan, pesantren mengalami deferensiasi, mobilisasi status, strata dan peran, termasuk pergeseran nilai, norma, tindakan dan perilaku masyarakat santri sebagai komunitas dalam pesantren.

Dinamika ideologi pesantren tidak semata-mata hanya merujuk pada pergeseran simbol yang unik dan terpisah yang dipertentangkan dengan sistem-sistem lain komunitas di luar pesantren. Melainkan juga pada sesuatu yang berciri ideologis, yaitu sesuatu yang dipahami dalam bentuk kemampuan kelompok atau kelas dominan dalam menghadirkan kepentingan kelompoknya sendiri di mata kelompok-kelompok lain sebagai kepentingan universal. Kemampuan (ideologis) semacam itu merupakan satu jenis sumber daya atau kekuatan yang ikut terlibat dalam atau menopang dominasi.³ Dinamika ideologi pesantren mewujudkan dalam bentuk pergeseran, perubahan, atau perkembangan simbol dan gerakan keagamaan pesantren. Yakni, gerakan Islamisasi yang dilakukan pesantren.

Sedangkan dinamika ekonomi merupakan pergeseran, perubahan, atau perkembangan ekonomi pesantren yang ditandai dengan penampilan fisik pesantren, penyediaan berbagai fasilitas pesantren, dan mobilitas status ekonomi komunitas pesantren seperti kiai, ustadz, guru, pegawai dan santri.

Sudah tentu, baik dinamika sosial, ideologi, maupun ekonomi yang terjadi di pesantren tidak semata-mata karena faktor internal. Tapi, juga faktor

3) Antony Giddens, *Central ...*, h.xxi-xxii

eksternal. Karena itulah dalam kajian ini, untuk bisa mengungkap fenomena dinamika pesantren secara utuh, tidak bisa hanya menggunakan teori "strukturasi" dan "The Third Way" dari Giddens. Namun juga diperlukan teori "hegemoni" Gramsci dan teori "tindakan represif" dari Althusser. Mengingat kenyataan bahwa Giddens lebih mementingkan faktor internal, sedangkan Gramsci dan Althusser lebih mementingkan faktor eksternal. Disinilah diperlukan perpaduan keduanya, atau justru menemukan kerangka teoritik baru.

Dinamika sosial, ideologi, dan ekonomi pesantren tersebut terjadi karena -meminjam teori strukturasi Giddens- agen⁴ manusia yakni individu kiai atau kelompok kiai secara berkesinambungan mereproduksi struktur⁵ berupa aturan dan sumber daya dan sistem sosial⁶ (*human agency*, struktur, dan *duality of structure*⁷). Dalam hal ini, terjadi hubungan timbal balik (dualitas) pelaku (agen⁸) dan struktur yang saling melengkapi (*enabling*) dan berlangsung dalam kurun waktu dan ruang tertentu.

Dualitas berarti tindakan aktor dan struktur saling mengandaikan. Bentuk yang tepat dari integrasi sosial adalah sesuatu yang dapat bekerja untuk menandakan bahwa interaksi sosial merupakan pe-maknaan terhadap agen manusia melalui reproduksi struktur dan sistem sosial.

Teori "The Third Way" Giddens menyebutkan bahwa dalam era globalisasi, agen cenderung memikirkan "jalan ketiga" sebagai pilihan ketiga antara sosialisme (kiri) dan kapitalisme (kanan), antara intervensi negara - Gramsci menyebut "Hegemoni"⁹, Louis Althusser menyebut "Ideological State Apparatus"¹⁰(ISA)- dan pasar bebas¹¹, antara modernisasi dan tradisionalisme, serta antara budaya kota dan budaya desa. Ini menunjukkan bahwa faktor eksternal, yakni hegemoni negara sebagai-mana yang dikemukakan oleh Gramsci dan tindakan represif negara sebagaimana yang di kemukakan Althusser, juga turut menentukan.

Dalam hal ini, pesantren merupakan reproduksi struktur dan sistem kemas-

4) Meski konsep agen dan tindakan agen (agency) pada umumnya merujuk pada tingkat mikro atau aktor manusia individual, namun konsep inipun dapat merujuk pada kolektivitas (makro) yang bertindak. Demikian halnya konsep struktur, biasanya mengacu pada struktur sosial bersekala besar, konsep inipun dapat mengacu pada struktur mikro, seperti orang yang terlibat dalam interaksi individual. Jadi, baik agen maupun struktur dapat mengacu pada fenomena tingkat mikro atau makro, atau kepada keduanya. George Ritzer, Douglas J. Goodman, *Teori Sosial Moderen*. Alimandan (alih bahasa), (Jakarta: Kencana, edisi keenam 2008), 506

5) yakni properti-properti yang berstruktur (aturan dan sumber daya)...properti yang memungkinkan praktik sosial serupa yang dapat dijelaskan untuk eksis di sepanjang ruang dan waktu dan yang membuatnya menjadi bentuk sistemik (Giddens, 1984:17). Struktur hanya akan terwujud karena adanya aturan dan sumber daya. Struktur itu sendiri tidak ada dalam ruang dan waktu. Fenomena sosial mempunyai kapasitas yang cukup untuk struktur. Giddens berpendapat, bahwa "struktur hanya ada di dalam dan melalui agen manusia" (Giddens, 1984:17). Giddens berupaya menghindarkan kesan bahwa struktur berada "di luar" atau "eksternal" terhadap tindakan aktor. Menurut Giddens, "struktur adalah apa yang membentuk dan menentukan terhadap kehidupan sosial, tetapi bukan struktur itu sendiri yang membentuk dan menentukan kehidupan sosial itu" (Giddens, 1989:256). Ibid, 510. Struktur "serta merta muncul" dalam sistem sosial, juga dapat menjelma dalam "ingatan agen yang berpengetahuan banyak". Ibid, 511.

6) yakni praktik sosial yang dikembangkan (reproduced) atau hubungan yang direproduksi antara aktor dan kolektivitas yang diorganisir sebagai praktik sosial tetap. Ibid, 511.

7) Tony Spytbey, *Sosial*, 35

8) Giddens memberikan kekuasaan besar terhadap agen. Dengan kata lain, agen mempunyai kemampuan untuk menciptakan pertentangan dalam kehidupan sosial, dan bahkan ia lebih yakin lagi bahwa agen tidak akan berarti apa-apa tanpa kekuasaan. Artinya, aktor berhenti menjadi agen bila ia kehilangan kemampuan untuk menciptakan pertentangan. George Ritzer, Douglas J. Goodman, *Teori*, 510.

9) atau menguasai dengan "kepemimpinan moral dan intelektual" secara konsensus. Menurut Gramsci, agar yang dikuasai mematuhi penguasa, yang dikuasai tidak hanya harus merasa mempunyai dan menginternalisasi nilai-nilai serta norma penguasa, lebih dari itu mereka juga harus memberi persetujuan atas subordinasi mereka.

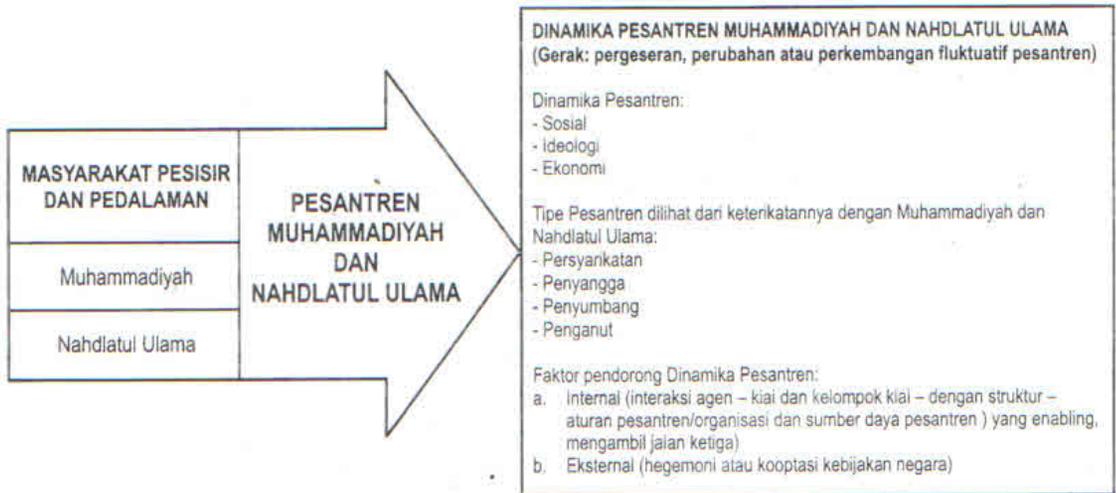
10) yakni perangkat negara yang ideologis.

11) Ibid, ix

arakatan yang dibangun oleh agensi berupa tindakan individu kiai dan kolektifitas Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Hubungan antara kiai dengan pesantren sangat erat dan saling melengkapi. Demikian halnya hubungan antara kiai dengan organisasi apakah itu Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama.

Dinamika yang sedang berlangsung di pesantren merupakan alternatif "jalan

ketiga" yang di tempuh dalam menyikapi perkembangan era global antara sosialisme dan kapitalisme, antara religiusitas dan sekularitas, antara budaya desa dengan kota, antara kebijakan pemerintah dengan keinginan warga, dan sebagainya. Itulah yang menjadikan pesantren Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di berbagai desa mengalami dinamika sosial, ideologi, ekonomi, dan tidak terlewatkan politik.



Gambar 1
Dinamika Pesantren Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama

Saat sekarang, pesantren memang tidak semata-mata merupakan lembaga perdesaan (berubah menjadi komunitas bahkan masyarakat perkotaan). Sistem pesantren yang masih *salaf* (tradisional) murni sudah tidak banyak. Pesantren yang besar-besarnya biasanya sudah berkembang menjadi pesantren *khalaf* (modern). Yakni, semacam perguruan yang memasukkan juga mata ajaran umum sesuai dengan sistem pendidikan nasional. Besar kecilnya pesantren dan sistem pendidikannya memengaruhi hubungan antara pesantren dan desa.

C. Pembahasan

1. Dinamika Masyarakat Pesisir dan Pedalaman di Pantura Kabupaten Lamongan

Masyarakat Lamongan, terutama di kawasan pesisir dan pedalaman pantai utara, merupakan masyarakat perdesaan yang sekaligus masyarakat santri. Sejak era Reformasi, telah terjadi perubahan-perubahan yang mengarah ke kehidupan perkotaan. Ditandai dengan adanya berbagai bangunan, fasilitas transportasi, wisata moderen, pendidikan, ekonomi (perdagangan), dan hotel.

Secara geografis, masyarakat perdesaan di pantai utara Kabupaten Lamongan dapat dibagi menjadi dua.

Yakni, kawasan pesisir dan pedalaman yang masing-masing dibatasi oleh perbukitan dan hutan. Masyarakat perdesaan di pesisir mayoritas bekerja sebagai nelayan dan petani *tegalan*. Sebagian menjadi pedagang, guru, dan pegawai pemerintahan. Sedangkan masyarakat perdesaan di pedalaman mayoritas bekerja sebagai petani *sawah* (kering dan basah). Tapi sejak krisis ekonomi pada masa akhir Orde Baru, banyak di antara mereka (petani) yang memilih bekerja di luar negeri terutama di Malaysia.

Masyarakat di pantai utara Lamongan merupakan masyarakat santri yang berideologi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Dominasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sangat tampak pada setiap desa, baik di pesisir maupun pedalaman. Dikatakan masyarakat santri, karena hampir di setiap desa terdapat pesantren yang berafiliasi kepada Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama. Masing-masing memiliki ciri khas dan mengalami dinamika yang cukup pesat.

Di perdesaan kawasan pesisir, terdapat tujuh pesantren yang berafiliasi ke Muhammadiyah. Terdiri dari tiga pesantren besar yakni Karangasem yang didirikan KH. Abdurrahman Syamsuri, pesantren Moderen Muhammadiyah didirikan KH. Muhammad Ridwan Syarqowi di desa Paciran dan pesantren *Al Islah* didirikan KH. Muhammad Dawam Shaleh di desa Sendang Agung. Ada pula empat pesantren kecil yakni *Ma'had Manarul Quran* di Paciran, *At-Taqwa* di desa Kranji, *Al Amin* yang didirikan KH. Amin di desa Tunggul (kini diasuh KH. Miftahul Fatah), dan *Al Ma'hadul Islamiy* didirikan KH. Qurani di desa Weru.

Sedangkan pesantren yang berafiliasi

ke Nahdlatul Ulama ada sebelas. Terdiri dari tiga pesantren besar yakni *Mazroatul Ulum* yang didirikan KH. Asyhuri di Paciran (kini diasuh putra angkatnya, KH. Muhammad Zahidin Asyhuri), pesantren *Tarbiyatut Thalabah* didirikan KH. Baqir Adlan di desa Kranji, dan Sunan Drajad didirikan KH. Abdul Ghafur di desa Banjaranyar. Delapan pesantren kecil yakni pesantren *Fatimiyah* di desa Banjaranyar, *Al Jihad* dan *Al Khadiri* di dusun Sukowati, desa Banjaranyar, *Al Ibrohimi* di dusun Jetak, desa Paciran, *Maslakhatul Huda* di dusun Kandang, desa Dengok, *Darul Jannah Al Ma'wa* di Tunggul, *Raodlatul Tullab* yang diasuh oleh KH. Salim Azhar di desa Sendang Duwur, *Ismailiyah* yang diasuh oleh KH. Mohammad Zubair di desa Sendang Agung.

Sementara di perdesaan kawasan pedalaman, terdapat dua pesantren yang berafiliasi kepada Muhammadiyah. Merupakan pesantren kecil (*salaf*) yakni *Al Islam* yang didirikan KH. Khozin di desa Tenggulun dan *Al Basyir* di Takerharjo. Sementara tiga pesantren lain yang berskala kecil berafiliasi ke Nahdlatul Ulama. Yakni, *Darul Ma'arif*, *Al Aman*, dan *Roudhatul Mutaabbidin* di desa Payaman, dan pesantren salaf lain di desa Sugihan serta desa Solokuro.

Berbagai pesantren tersebut memang awalnya menyatu dengan masyarakat desa setempat. Mengembangkan misi dakwah dan pendidikan Islam dengan berbagai formulasi pengelolaan. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, dinamika institusi, dan ekonomi pesantren, mulai ada indikasi terpisah dari masyarakat desa. Pada awalnya, pesantren hanya mengadakan pengajian agama. Kemudian mendirikan madrasah, sekolah umum, perguruan tinggi, dan berbagai

unit usaha. Karena perkembangan inilah, yang datang ke pesantren tidak hanya masyarakat sekitar pesantren. Tetapi juga masyarakat dari berbagai daerah. Mereka hadir tidak sekadar untuk *nyantri*, tetapi juga sekolah. Fenomena tersebut menunjukkan jika kini pesantren di kawasan utara Kabupaten Lamongan sedang mengalami perubahan. Dinamikanya terus berlangsung.

2. Faktor Pendorong Dinamika Pesantren di Kawasan Pesisir dan Pedalaman Pantai Utara Kabupaten Lamongan

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah telah menjangkau berbagai wilayah Indonesia, termasuk di kawasan utara kabupaten Lamongan, yakni pesisir di kecamatan Paciran dan pedalaman di kecamatan Solokuro.

Di kecamatan Paciran telah di bangun industri pariwisata yakni Wisata Bahari Lamongan dan Pelabuhan Internasional. Kebijakan seperti ini mendorong para pemilik modal hadir di kawasan Paciran dan berusaha memiliki sawah dan pekarangan untuk pengembangan industri. Akibatnya, harga tanah semakin tinggi dan terkadang pesantren tidak bisa menjangkau harga tersebut. Padahal, pesantren membutuhkannya untuk pengembangan pesantren.

Di kecamatan Solokuro, karena akses bekerja di luar negeri yang terbuka luas, maka lebih dari 60% penduduk pergi keluar negeri untuk bekerja menjadi TKI dengan harapan bisa memperbaiki ekonomi. Karena dengan hanya bertani tidak menjamin perbaikan taraf hidup. Para kapital yang lebih dulu menguasai lahan-lahan di kawasan Paciran tidak menutup kemungkinan berupaya untuk menguasai lahan-lahan di kawasan Solokuro untuk pengem-

bangun wilayah industri karena harga masih relatif murah.

Pada bidang pendidikan, pemerintah melakukan reformasi di antaranya melalui UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang tidak mendiskriminasikan antara pendidikan umum dengan pendidikan keagamaan, termasuk pesantren. Hal ini menyangkut pemberian anggaran untuk perbaikan fasilitas, manajemen, dan kesejahteraan bagi tenaga pendidik, serta pengakuan legalitas kelulusan dan kelembagaan.

Menghadapi perubahan-perubahan tersebut, kiai sebagai aktor di pesantren bersinergi dengan para ahli di yayasan melakukan reformulasi pesantren. Ada yang melakukan reformulasi ideologi, namun ada pula kelembagaan.

Pesantren Muhammadiyah yang berada di kawasan pedalaman melakukan reformulasi ideologi yang ditandai dengan semakin bergesernya ideologi Muhammadiyah ke "*salafi*", tapi tidak dalam kelembagaan. Artinya, konsentrasi pesantren hanya pada pedalaman agama. Sedangkan pendidikan formal dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan Muhammadiyah di luar pesantren. Cara ini ditempuh untuk menjaga konsentrasi pesantren dalam menanamkan "*addin*" kepada para santri. Karena realitas menunjukkan bahwa pesantren yang membuka sekolah maupun madrasah, maka pendidikan "*addin*" akan terkalahkan.

Bergesernya ideologi di pesantren yang berafiliasi ke Muhammadiyah disebabkan di antara keluarga pengelola pesantren Muhammadiyah memperoleh pengalaman keagamaan "*salafi*" dari pesantren Ngruki, bahkan dari Malaysia, dan Afghanistan. Ideologi yang kemudian dikembangkan merupakan formulasi ideologi Muhammadiyah dengan "*salafi*".

Karena pergeseran ideologi itulah, pesantren yang berafiliasi kepada Muhammadiyah tidak memperoleh simpati dari masyarakat Muhammadiyah setempat. Sehingga, sebagian besar santri berasal dari luar Jawa, begitu juga pengasuhnya.

Berbeda dengan pesantren Muhammadiyah tersebut, pesantren Nahdlatul Ulama di kawasan pedalaman lebih melakukan formulasi kelembagaan daripada ideologi. Diantaranya dengan membuka sekolah umum dan kejuruan di pesantren. Akibatnya dari sisi ideologi memang tetap NU, namun tidak mewujud dalam bentuk kepesantrenan dan lebih ke keperguruan. Pendidikan agama diberikan di sekolah atau madrasah, sedangkan di pesantren hanya untuk anak-anak usia pra-sekolah dan pendidikan dasar dalam bentuk Taman Pendidikan Al-Quan. Ini terjadi karena masyarakat sekitar terutama di kalangan remaja sudah tidak lagi berminat *nyantri*. Mereka hanya sekolah di lingkungan pesantren, atau pergi ke Malaysia untuk memperoleh penghasilan ekonomi yang lebih menjanjikan.

Sedangkan pesantren Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di kawasan pesisir melakukan reformulasi kelembagaan dengan tetap mempertahankan ciri khas kepesantrenan. Ideologi yang ditanamkan kepada para santri juga tetap, yakni Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama. Inilah yang menjadikan pesantren Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di kawasan pesisir berkembang jauh lebih pesat daripada pesantren Muhammadiyah dan NU di kawasan pedalaman.

Diantara kiai NU di kawasan pesisir, ada yang dekat dengan pemerintah dan para pengusaha. Mereka mendukung secara langsung terhadap pengem-

bangun wisata dan industri yang sedang berlangsung, bahkan beraktivitas dalam bidang industri. Namun, ada pula yang mengambil jarak dengan mengontrol terhadap pengembangan wisata dan industri tersebut.

Para kiai Muhammadiyah juga dekat dengan pemerintah setempat (bupati Lamongan dan camat Paciran) dan para pengusaha. Namun, mereka tidak mau terlibat secara langsung dan justru selalu melakukan kontrol terhadap pengembangan industri pariwisata dan pelabuhan internasional.

Kedekatan para kiai dan pengusaha dengan bupati Lamongan, tidak lepas dari upaya bupati saat itu (H. Masfuk, SH) yang selalu berusaha mendekati para kiai dan pengusaha. Bupati akhirnya berhasil mengambil hati para kiai dan pengusaha, sehingga pengembangan industri pariwisata dan pelabuhan internasional di kawasan pantura kabupaten Lamongan dapat berlangsung lancar.

Padahal sebelumnya, ditentang keras oleh para kiai. Yakni almarhum KH. Abdurrahman Syamsuri (Pesantren Karangasem Muhammadiyah), KH. Ridwan Syarqowi (Pesantren Moderen Muhammadiyah), dan KH. Baqir (Pesantren Tarbiyatut Tholabah).

Sudah tentu, kiai yang dekat dengan pemerintah dan para kapital lebih mudah memperoleh "dana" pengembangan pesantren daripada yang mengambil jarak. Sehingga, ada pesantren yang secara fisik berkembang secara pesat, tapi ada pula yang berkembang lambat. Pesat dan lambatnya perkembangan pesantren, bahkan ada yang mengalami penurunan dari jumlah santri, ternyata sangat ditentukan oleh figur kiai.

Pesantren yang pendirinya masih hidup, memiliki komitmen perjuangan

Islam yang sangat tinggi. Mereka memperoleh kepercayaan dan dukungan sangat besar dari masyarakat. Pesantren tersebut mengalami perkembangan.

Namun pesantren yang sudah tidak lagi dipegang oleh kiai sepuh, kharisma-tiknya cenderung kurang kuat dan dukungan masyarakat semakin berkurang. Sehingga, ada yang hanya bertahan, bahkan ada yang justru mengalami penurunan terutama bisa dilihat dari jumlah santri.

3. Tipologi Kiai dan Pesantren Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama

Paparan diatas nampak, bahwa kiai merupakan kunci sentral, sekaligus faktor penentu terjadinya dinamika pesantren. Semua kiai memiliki komitmen yang tinggi dalam penegakan nilai-nilai Islam melalui pendidikan pesantren, sesuai dengan paham keagamaanya. Hanya saja implementasinya dalam kehidupan sosial, pengembangan kelembagaan, ekonomi, dan politik berbeda.

Ada kiai yang mengajarkan Islam yang murni sesuai dengan al Quran dan *Assunnah Shahihah* dan harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Namun ada yang mengajarkan kemurnian Islam untuk diimplementasikan secara bertahap sesuai situasi dan faktor masyarakat dengan harapan lambat laun masyarakat tersebut bisa menerima dan kemurnian ajaran Islam bisa diwujudkan. Ada pula kiai yang tidak banyak mempersoalkan kemurnian ajaran Islam, mengkombinasikan dengan budaya lokal, yang penting memiliki kemaslahatan umat.

Tipologi kiai pertama merupakan tokoh Muhammadiyah. Seperti KH. Khozin pengasuh pesantren Al-Islam, KH. Abdul Hakam Mubarak pengasuh

pesantren Karangasem, KH. Muhammad Munir pengasuh pesantren Moderen Muhammadiyah, dan KH. Hasan Nawawi pengasuh pesantren At-Taqwa Muhammadiyah.

Tipologi kiai kedua merupakan tokoh yang berafiliasi kepada Muhammadiyah, seperti KH. Dawam pengasuh pesantren Al-Islah, KH. Miftakhul Mustofa pengasuh pesantren Al-Amin, dan KH. Muhammad Sabaq pengasuh pesantren Manarul Quran.

Sedangkan tipologi kiai ketiga banyak dikembangkan oleh tokoh Nahdlatul Ulama seperti KH. Abdul Ghafur pengasuh pesantren Sunan Drajad, KH. Muhammad Nasrullah pengasuh pesantren Tarbiyatut Tholabah, KH. Muhammad Zahidin Asyhuri pengasuh pesantren Mazroatul Ulum, dan berbagai kiai NU yang lain.

Dalam pengembangan kelembagaan pesantren, ada kiai yang tetap mempertahankan tradisi awal pesantren, yakni dengan menanamkan nilai-nilai aqidah, syariah dan muamalah melalui pengajian dan pendidikan madrasah diniyah pesantren. Tetapi, tetap mengikutkan para santrinya untuk mengikuti ujian negara kejar paket A, B, C, bekerjasama dengan lembaga pendidikan formal di luar pesantren untuk mendidik para santrinya. Atau, menyerahkan para santrinya untuk mengikuti pendidikan formal di luar pesantren.

Kebijakan kelembagaan seperti ini diambil oleh kiai bukan karena ketidakmampuan kiai untuk mendirikan sekolah atau madrasah formal di pesantren, namun demi menjaga keaslian pesantren agar lebih konsen dalam penanaman "Addin" kepada para santri.

Ada pula kiai yang mengembangkan kelembagaan pesantren dengan mendirikan lembaga pendidikan formal, baik

sekolah maupun madrasah, dan tetap menjadikan nilai-nilai aqidah, syariah dan muamalah sebagai prioritas utama. Kebijakan kelembagaan seperti ini diambil oleh kiai sebagai upaya pengembangan pesantren, menyahuti perkembangan pendidikan nasional dan aspirasi masyarakat yang menghendaki putra-putrinya selain memperoleh pendidikan agama, juga ketrampilan dan ilmu umum secara formal sehingga lulus dari pesantren memperoleh ijazah formal.

Tipe pesantren pertama dikembangkan oleh pesantren Al-Islam, sedangkan tipe pesantren kedua dikembangkan oleh mayoritas pesantren Muhammadiyah yakni Karangasem, Modern Muhammadiyah, dan At-Taqwa Muhammadiyah, pesantren yang berafiliasi kepada Muhammadiyah yakni Al-Islah, Al-Amin, dan Manarul Quran. Serta pesantren yang berafiliasi kepada Nahdlatul Ulama, seperti Tarbiyatut Tholabah, Mazroatul Ulum, Sunan Drajad, Fatimiyah, Darul Ma'arif, Al-Aman, Roudlotul Muttaabidin, dan sebagainya.

Tipe pesantren pertama dengan hanya mengelola madrasah diniyah, sumber dana dari pemerintah sangat terbatas dan hanya memperoleh dana insentif untuk ustadz dan santrinya. Itu sangat minim dan belum tentu diterima setiap bulan. Sehingga untuk bisa mengembangkan pesantren harus menggali sumber dana lain.

Sedangkan tipe pesantren kedua, karena mengembangkan berbagai jenis dan jenjang lembaga pendidikan, bisa memperoleh berbagai jenis sumber dana dari pemerintah yang relatif jauh lebih besar, bahkan bisa digunakan untuk mengembangkan sarana dan prasarana lembaga pendidikan pesantren.

Dari sisi dana, tipe pesantren kedua lebih terbantu oleh pemerintah, sehingga pengembangan fisik pesantren lebih

pesat dibandingkan dengan tipe pesantren pertama. Dari sisi animo masyarakat, juga tipe pesantren yang kedua jumlah santrinya jauh lebih besar daripada tipe pesantren pertama.

Namun untuk tipe pesantren yang kedua, sekalipun sama-sama memiliki berbagai jenis dan jenjang lembaga pendidikan, animo masyarakat yang *nyantri* atau sekolah di pesantren tersebut sangat ditentukan oleh figur kiai yang mengasuh pesantren tersebut. Pesantren yang diasuh oleh kiai sepuh (pendiri pesantren) jumlah santrinya dari tahun ke tahun cenderung meningkat secara signifikan. Sedangkan pesantren yang tidak lagi diasuh kiai sepuh, jumlah santrinya cenderung mengalami penurunan. Misalnya pesantren Al-Islah dan Sunan Drajad yang masih diasuh kiai sepuh, jumlah santrinya terus meningkat.

Sedangkan pesantren Karangasem, Moderen Muhammadiyah, Al-Amin, Mazroatul Ulum, dan Tarbiyatut Tholabah yang sudah tidak lagi diasuh oleh kiai sepuh (karena meninggal) cenderung jumlah santrinya mengalami penurunan. Khusus untuk pesantren Manarul Quran dan At-Taqwa Muhammadiyah, karena masih relatif baru, maka figur kiai belum bisa dijadikan standar peningkatan jumlah santri.

Dalam pengembangan ekonomi pesantren, para kiai tetap mengusahakan agar pengembangan ekonomi pesantren sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Islam, berbasis syariah dan bermanfaat tidak hanya bagi pengembangan pesantren tetapi juga kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan usaha perekonomian pesantren tidak hanya berorientasi profit (keuntungan semata) tetapi juga sosial. Itulah yang menjadikan pesantren menyisihkan hasil usahanya untuk membantu masyarakat yang kurang

mampu berupa subsidi bagi para santri yang kurang mampu membiayai sekolah di pesantren, menampung fakir miskin, memberikan sumbangan bagi masyarakat yang terkena musibah, serta terhadap organisasi.

Memang tidak ada kesepakatan secara formal bahwa pesantren-pesantren tersebut harus memberikan keuntungan usahanya ke organisasi yang dianut (Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama), namun sudah menjadi tradisi dan saling memahami bila ada kegiatan organisasi pesantren harus memberikan kontribusinya.

Di Muhammadiyah, karena pesantren juga merupakan amal usaha Muhammadiyah, sehingga sekolah, madrasah, rumah sakit, koperasi dan berbagai unit produksi pesantren wajib memberikan kontribusi kepada Muhammadiyah, dana yang terhimpun juga digunakan untuk aktivitas organisasi dan pembinaan pesantren tersebut. Bahkan ada ketentuan, semua aset didaftar sebagai aset Muhammadiyah. Dengan ketentuan seperti itu, maka ada pesantren Muhammadiyah yang secara yuridis formal mendaftarkan semua aset (gedung, tanah dan berbagai fasilitasnya) ke Pimpinan Pusat Muhammadiyah¹² Ada juga pesantren yang hanya menggunakan nama Muhammadiyah dan keberatan bila semua aset pesantren didaftar atas nama Muhammadiyah.¹³

Sedangkan pesantren di Nahdlatul

Ulama tidak selalu demikian, karena pesantren di NU merupakan otoritas murni kiai, bukan organisasi. Hanya saja, sekolah atau madrasah yang menggunakan nama Maarif dihimbau untuk memberikan iuran ke Lembaga Maarif.

Dalam hal politik, memang tidak ada kiai yang secara langsung terlibat dalam partai politik, namun mayoritas kiai Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama memiliki kekuatan besar dalam menentukan dukungan politik. Inilah yang menjadikan para kiai didekati oleh berbagai kader maupun tokoh politik untuk memperoleh dukungan masa. Begitu juga didekati para pengambil kebijakan untuk memperoleh dukungan pembangunan yang akan dilaksanakan di kawasan pesantren. Dalam hal ini, kiai tetap memiliki daya tawar yang tinggi, sehingga tidak seluruhnya tokoh politik maupun pejabat yang diterima kiai, secara otomatis mendapat dukungan kiai.

Afiliasi politik kiai juga ternyata tidak seluruhnya selalu segaris dengan afiliasi organisasi. Bila sejak masa awal Reformasi, sewaktu Amin Rais menjadi ketua PAN, Muhammadiyah identik dengan Partai Amanat Nasional (PAN)¹⁴ dan sewaktu Abdurrahman Wachid menjadi ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nahdlatul Ulama identik dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), maka dalam perkembangannya tidak selalu demikian.

-
- 12) Antara lain pesantren Moderen Muhammadiyah dan At-Taqwa Muhammadiyah, sedangkan pesantren Al-Islah, Al-Islah, Al-Amin, dan Manarul Quran sekalipun didirikan dan diasuh oleh tokoh atau simpatisan Muhammadiyah, namun karena tidak menggunakan nama Muhammadiyah tidak mendaftarkan diri sebagai aset Muhammadiyah. Hanya saja SMP Muhammadiyah 12 yang berada di lingkungan pesantren Al-Islah secara formal menjadi milik Muhammadiyah karena sejak awal didirikan oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah Sendangagung, demikian juga MI Muhammadiyah yang ada di lingkungan pesantren Al-Amin -sekalipun tanah yang ditempati MI Muhammadiyah tersebut milik Yayasan Al-Amin-
- 13) Yakni pesantren Karangasem, sewaktu KH. Abdurrahman Syamsuri masih hidup semua aset pesantren didaftarkan atas nama Muhammadiyah, namun sewaktu diganti oleh putranya, terutama KH. Abdul Hakam Mubarak, berbagai lembaga pendidikan, panti asuhan dan PKU memang tetap menggunakan nama Muhammadiyah namun beliau keberatan bila aset pesantren tersebut diatasnamakan Muhammadiyah.
- 14) Sekalipun tidak pernah dalam sejarah Muhammadiyah menyatakan berafiliasi kepada partai politik tertentu, termasuk kepada PAN. Warga Muhammadiyah diberi kebebasan untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Namun masyarakat luas masih banyak yang mengidentifikasi Muhammadiyah dengan PAN.

Ada kiai Muhammadiyah yang tetap konsen afiliasi terhadap PAN, misalnya KH. Khozin, KH. Dawam, KH. Abdul Hakam Mubarak, dan KH. Miftahul Mustofa, namun ada juga yang bergeser ke Partai Keadilan Sejahtera (PKS) misalnya KH. Muhammad Munir, KH. Hasan Nawawi, dan KH. Muhammad Sabiq.

Demikian halnya ada kiai Nahdlatul Ulama yang tetap konsen terhadap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) misalnya KH. Muhammad Zahidin Asyhudi, KH. Muhammad Nasrullah dan lain-lain.

Namun, ada pula yang berganti-ganti afiliasi partai politik, tidak harus sama ideologisnya, yang penting bersedia mengikuti keinginan kiai, dan tidak harus secara ekonomi menguntungkan kiai. Misalnya KH. Abdul Ghafur, sewaktu Golkar berkuasa dekat dengan Presiden Soeharto, sewaktu PDI berkuasa dekat dengan Presiden Megawati Soekarnoputri, dekat dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Gubernur Soekarwo yang disung Partai Demokrat. Beliau juga mendukung Pasangan Masfuk dan Tsalis yang diusung PAN sehingga menjadi bupati dan wakil bupati Lamongan, beralih ke partai Gerindra sewaktu Tsalis diusulkan partai Gerindra dan PKU menjadi bupati Lamongan, namun gagal menjadi bupati dikalahkan pasangan Fadli-Amar yang diusung oleh partai koalisi PAN, PKB dan Golkar.

Penyebab aspirasi kiai terhadap partai politik tertentu ternyata ber-variasi. Ada yang karena kesamaan ideologis dan organisasi, ada yang karena kesamaan ideologis dan jaminan perolehan finansial, namun ada juga yang hanya karena kepentingan finansial. Bagi kiai yang memberikan aspirasi politik karena

kesamaan ideologis dan organisasi hanya mem-perhitungkan aspirasinya bisa di wujudkan dengan terpilihnya tokoh politik tersebut. Ia tidak banyak mem-perhitungkan keuntungan politis maupun ekonomi bagi pengembangan pesantren ke depan.

Bagi kiai yang memberikan aspirasi politik karena kesamaan ideologis dan jaminan perolehan finansial, selain diharapkan aspirasinya tersalurkan juga berharap memperoleh keuntungan ekonomi bagi pengembangan pesantren. Sedangkan bagi kiai yang menyalurkan aspirasi politik karena memperoleh finansial, banyak berharap memperoleh keuntungan ekonomi demi pengembangan pesantren.

Tipe kiai pertama yakin, bahwa hanya dengan memilih tokoh dan partai yang sama dengan ideologi dan organisasi pesantren, visi dan misi pesantren bisa diwujudkan. Tipe kiai kedua yakin sekalipun bukan satu organisasi, kalau ideologinya sama, visi dan misi pesantren bisa diwujudkan, di samping itu juga *bargaining* politik bisa dilakukan ke berbagai pihak, sehingga memungkinkan bisa diperoleh dana dari berbagai sumber yang bisa mendukung pengembangan pesantren lebih cepat.

Sedangkan tipe kiai ketiga yakin, pencapain visi dan misi pesantren itu bisa dicapai bila pesantren dekat dengan berbagai kekuasaan, *bargaining* bisa bebas dan sumber dana bisa diperoleh lebih banyak, sehingga bisa mendorong laju perkembangan pesantren lebih pesat.

Sekalipun afiliasi politik kiai tersebut berbeda, namun masing-masing mereka tetap menyakinkan kepada masyarakatnya bahwa yang dilakukan itu benar, demi dakwah. Itulah yang menjadikan pesantren tetap eksis di

tengah-tengah masyarakat, sekalipun laju perkembangannya berbeda.

Dengan kata lain, perbedaan afiliasi politik para kiai tersebut ternyata berimplikasi terhadap terjadinya dinamika pesantren, baik secara kelembagaan, sosial dan budaya, maupun ekonomi pesantren.

4. Dinamika Pesantren Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam Perspektif Teori Giddens, Gramscy dan Louis Althusser

Fenomena dinamika pesantren Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama diatas menunjukkan, dalam perspektif teori Strukturasi Giddens, "dinamika pesantren terus berlangsung karena agen (kiai) yang bersinergi dengan para ahli di Yayasan Pesantren secara berkesinambungan mereproduksi struktur dan sistem masyarakat dalam interaksi sosial (*human agency*, struktur dan '*duality of structure*'¹⁵).

Dalam hal ini ada kiai yang hanya menetapkan satu jalan dalam mengembangkan pesantren yakni satunya ideologi, kelembagaan, ekonomi dan politik guna tegaknya tatanan Islam, namun ada pula yang memilih jalan ketiga. Teori "*The Third Way*" Giddens menyebutkan, dalam era globalisasi, agen cenderung memikirkan "jalan ketiga" sebagai pilihan ketiga, antara sosialisme (kiri) dan kapitalisme (kanan), atau antara intervensi negara. Gramsci menyebut "Hegemoni"¹⁶, Louis Althusser menyebut "*Ideological State Apparatus*"¹⁷ (ISA) dan pasar bebas¹⁸.

Jalan ketiga yang ditempuh oleh kiai tidak hanya pilihan ketiga antara

sosialisme dan kapitalisme, dan antara intervensi negara dengan pasar bebas, melainkan antara kebenaran (syariat Islam) dengan kemaslahatan ummat. Yang dilakukan oleh kiai adalah bagaimana ideologi Islam yang difahami oleh para kiai itu bisa diselenggarakan dalam berbagai aktivitas pesantren, yang secara ekonomi berdampak positif bagi pengembangan kelembagaan pesantren dan masyarakat sekitar, serta secara politis menjadikan pesantren tetap eksis ke depan dan didukung oleh masyarakat sekitar.

Dalam hal ini Giddens melihat faktor internal yang mendorong terjadinya dinamika pesantren. Sedangkan Gramscy dan Althusser lebih melihat faktor eksternal. Bila menggunakan teori Gramscy dan Althusser, kebijakan pemerintah, yakni Reformasi pendidikan melalui UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta, pengembangan Wisata Bahari Lamongan (WBL) dan pelabuhan internasional berkontribusi terhadap dinamika sosial, ideologi dan ekonomi pesantren Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di kawasan pesisir dan pedalaman pantai utara kabupaten Lamongan.

Faktor eksternal terutama kebijakan pemerintah, yakni Reformasi pendidikan melalui UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan hadirnya kapital melalui industrialisasi (Wisata Bahari Lamongan dan pelabuhan internasional) di kawasan pesantren memang memiliki kontribusi bagi terjadinya dinamika sosial, yakni kelembagaan (manajemen, jenis pen-

15) Tony Spiby, *Social Change Development & Dependency*, (Cambridge: Polity Pres, 1996), 35

16) atau menguasai dengan "kepemimpinan moral dan intelektual" secara konsensus. Menurut Gramsci, agar yang dikuasai mematuhi penguasa, yang dikuasai tidak hanya harus merasa mempunyai dan menginternalisasi nilai-nilai serta norma penguasa, lebih dari itu mereka juga harus memberi persetujuan atas subordinasi mereka.

17) yakni perangkat negara yang ideologis.

18) *Ibid*, ix

didikan beserta kurikulum, model pembelajaran dan penilaian) dan dinamika ekonomi pesantren, namun yang paling dominan adalah faktor internal, yakni figur kiai.

Kiai inilah merupakan aktor utama yang bersinergi dengan para ahli di pesantren untuk melakukan formulasi pesantren, menyangkut jenis-jenis pendidikan yang dikembangkan beserta muatan kurikulum, strategi pembelajaran dan penilaian yang dilakukan. Penyediaan fasilitas pendidikan, ibadah, asrama, olahraga, pertemuan, kantin, mini market, informasi dan komunikasi, dan berbagai fasilitas lainnya. Dengan penyediaan fasilitas yang lebih representatif ini, para santri bisa berkonsentrasi belajar, dan tidak hanya belajar agama, ilmu umum dan ketrampilan. Tapi, juga belajar untuk hidup dan berkehidupan.

C. Temuan dan Implikasi

Temuan dari studi ini mencabar sekaligus menyempurnakan teori Strukturasi¹⁹ dan teori "*The Third Way*" Giddens, namun menolak teori Hegemoni Gramsci dan teori "*Cuercy*" Louis Althusser.

Dilihat dari kerangka teori Strukturasi Giddens, dinamika pesantren terus berlangsung karena agen (kiai yang bersinergi dengan para ahli di Yayasan Pesantren) secara berkesinambungan mereproduksi struktur dan sistem masyarakat dalam interaksi sosial (*human agency*, struktur dan '*duality of structure*'²⁰).

Ini membuktikan interaksi yang dilakukan agen (kiai) dengan struktur

(aturan dan sumberdaya) tidak hanya berlangsung dalam struktur internal (dalam diri kiai), namun juga dengan struktur internal pesantren (aturan dan para ahli di pesantren), dan struktur eksternal pesantren (kebijakan pemerintah tentang pendidikan dan pengembangan ekonomi masyarakat, para pemilik kapital/pengusaha, dan lain-lain). Dalam hal ini, ada kiai yang hanya menetapkan satu jalan dalam mengembangkan pesantren, yakni satunya ideologi, kelembagaan, dan ekonomi guna tegaknya tatanan Islam, namun ada pula yang memilih jalan ketiga.

Teori "*The Third Way*" Giddens menyebutkan, dalam era globalisasi, agen cenderung memikirkan "jalan ketiga" sebagai pilihan ketiga antara sosialisme (kiri) dan kapitalisme (kanan). Atau, antara intervensi negara (Gramsci menyebut "*Hegemoni*"²¹, Louis Althusser menyebut "*Ideological State Apparatus*"²² (ISA) dan pasar bebas²³. Jalan ketiga yang ditempuh oleh kiai tidak hanya pilihan ketiga antara sosialisme dan kapitalisme, dan antara intervensi negara dengan pasar bebas, melainkan antara kebenaran (syariat Islam) dengan kemaslahatan ummat.

Yang dilakukan oleh kiai adalah bagaimana ideologi Islam yang di pahami oleh para kiai itu bisa di selenggarakan dalam berbagai aktivitas pesantren, yang secara ekonomi berdampak positif bagi pengembangan kelembagaan pesantren dan masyarakat sekitar, serta secara politis menjadikan

19) Yang dicabar dari teori strukturasi Giddens adalah interaksi agen dengan struktur saling mempengaruhi, saling menentukan. Sedangkan yang disempurnakan dari teori Strukturasi Giddens adalah interaksi agen dengan struktur internal dan eksternal. Giddens hanya menyebut interaksi agen dengan struktur internal.

20) Tony Spycy, *Social Change Development & Dependency*, (Cambridge: Polity Pres, 1996), 35

21) atau menguasai dengan "kepemimpinan moral dan intelektual" secara konsensus. Menurut Gramsci, agar yang dikuasai mematuhi penguasa, yang dikuasai tidak hanya harus merasa mempunyai dan menginternalisasi nilai-nilai serta norma penguasa, lebih dari itu mereka juga harus memberi persetujuan atas subordinasi mereka.

22) yakni perangkat negara yang ideologis.

23) *Ibid*, ix

pesantren tetap eksis ke depan dan didukung oleh masyarakat sekitar.

Dalam hal ini, Giddens melihat faktor internal yang mendorong terjadinya dinamika pesantren. Sedangkan Gramsci dan Althusser lebih melihat faktor eksternal. Bila menggunakan teori Gramsci dan Althusser, kebijakan pemerintah yakni reformasi pendidikan melalui UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan kehadiran kapital melalui pengembangan Wisata Bahari Lamongan (WBL) dan pelabuhan internasional berkontribusi terhadap dinamika sosial, ideologi, dan ekonomi pesantren Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di kawasan pesisir dan pedalaman di pantai utara kabupaten Lamongan.

Hasil penelitian menunjukkan faktor eksternal terutama kebijakan pemerintah tentang reformasi pendidikan melalui UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan kehadiran kapital melalui pengembangan Wisata Bahari Lamongan dan Pelabuhan Internasional memiliki kontribusi bagi terjadinya dinamika sosial kelembagaan dan ekonomi pesantren. Namun yang paling menentukan adalah faktor internal, yakni figur kiai sebagai aktor yang bersinergi dengan para ahli di pesantren.

Dalam hal ini, dinamika sosial yakni kelembagaan, ideologi, dan ekonomi pesantren terjadi karena kiai sebagai aktor yang bersinergi dengan para ahli di Yayasan Pesantren secara aktif melakukan reformasi kelembagaan pesantren secara berkelanjutan seiring dengan perubahan-perubahan kebijakan pemerintah terkait dengan penyelenggaraan pendidikan dan perubahan kawasan sekitar pesantren, serta kecenderungan kebutuhan masyarakat masa itu dan masa depan.

Karena itu ada pesantren yang tetap

mempertahankan ciri khas kepesan-trenan (diniyah), namun ada juga yang melakukan reformasi menjadi "keperguruan".

Dilihat dari keterikatannya dengan organisasi Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama, terjadi variasi. Ada pesantren yang tetap konsen dan mematuhi semua ketentuan organisasi. Ada yang memenuhi ketentuan kecuali dalam penyerahan aset pesantren ke organisasi. Ada yang hanya mematuhi sebagian kewajiban finansial ke organisasi. Namun, ada pula yang hanya konsep dalam penanaman ideologi dan tidak dalam kontribusi finansial maupun ikatan kelembagaan.

Tipe pesantren pertama sebagai pesantren "persyarikatan" atau pesantren "jamiyah". Tipe pesantren kedua merupakan pesantren "penyangga". Tipe pesantren ketiga merupakan pesantren "penyumbang". Sedangkan tipe pesantren keempat merupakan pesantren "panganut".

Empat tipe tersebut dimiliki oleh Muhammadiyah. Sedangkan NU hanya memiliki tipe pesantren "penyumbang" dan "panganut". Perbedaan tersebut terjadi karena perbedaan konteks sejarah berdirinya pesantren di Indonesia. Bahwa pesantren di Muhammadiyah merupakan amal usaha Muhammadiyah, sedangkan pesantren di Nahdlatul Ulama merupakan amal usaha masing-masing kiai secara pribadi.

Ini menunjukkan kebijakan yang diambil oleh kiai dalam mengembangkan kelembagaan pesantren yang sudah tentu juga terkait dengan ekonomi pesantren, merupakan formulasi pemikiran, nilai, dan sikap dari hasil interaksi dengan para ahli di Yayasan Pesantren (struktur dalam pesantren) dalam menyahuti kebijakan organisasi, kebijakan pemerintah tentang pendidikan nasional, kehadiran kapital, dan

kebutuhan masyarakat (struktur di luar pesantren). Tidak semata-mata hanya hasil interaksi kiai dengan struktur yang ada dalam diri kiai (sebagaimana yang dikemukakan Giddens). Bukan juga hanya karena kiai sebagai individu memang kritis dan problematik (sebagaimana pendapat Peter L. Berger). Juga bukan hanya karena individu tidak bisa dilepaskan dari posisi di mana individu berada, ruang, dan waktu (sebagaimana dikemukakan oleh Alfred Schutz). Melainkan, kenyataan menunjukkan lebih penting lagi adalah kemauan, kemampuan, dan peluang kiai yang bersinergi dengan para ahli sangat menentukan bagi terjadinya dinamika di pesantren sekarang dan ke depan.

D. Kesimpulan

Berangkat dari pembahasan di atas bisa disimpulkan, bahwa faktor eksternal terutama kebijakan pemerintah tentang reformasi pendidikan dan kehadiran para pemilik kapital di sekitar pesantren memiliki kontribusi bagi terjadinya dinamika ideologi, atau kelembagaan dan ekonomi di pesantren Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang ada di kawasan pesisir dan pedalaman pantai utara kabupaten Lamongan. Namun yang paling dominan adalah faktor internal, yakni figur kiai yang bersinergi dengan para ahli di Yayasan Pesantren. Dalam hal ini, ada kiai yang hanya mengambil satu jalan ideologis, namun ada pula kiai yang menggunakan jalan ketiga, yakni antara ideologis dengan realistik (kemaslahatan ummat).

Karena itu, agar pembangunan pendidikan dan ekonomi, terutama di kawasan pesantren lebih berhasil, kedepan harus dilakukan reformulasi kebijakan, dari sentralisasi menjadi desentralisasi, berupa pelibatan para kiai

pemangku pesantren, baik pada tataran perencanaan maupun pelaksanaan. Dalam hal ini, kemampuan *bargaining* pemerintah terhadap para kiai sangat menentukan.

Pemerintah dalam mengambil kebijakan pembangunan, khususnya di kawasan pesantren, harus benar-benar memahami tipologi kiai, melakukan pendekatan yang berbeda, agar kebijakan yang diambil bisa diterima dan berlangsung dengan baik. Terhadap kiai yang mengambil jalan ketiga, tawar menawar bisa dilakukan, sepanjang ada keuntungan yang bisa diperoleh kiai. Namun terhadap kiai yang memiliki ideologis kuat, maka harus lebih berhati-hati, karena tidak semua tawaran, sekalipun secara ekonomis menguntungkan terhadap kiai tersebut bisa diterima.

E. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka ada tiga saran yang penulis rekomendasikan untuk segera dilakukan oleh pemerintah:

1. Agar pembangunan pendidikan dan ekonomi, terutama di kawasan pesantren lebih berhasil, kedepan harus dilakukan reformulasi kebijakan, dari sentralisasi menjadi desentralisasi, berupa pelibatan para kiai pemangku pesantren, baik pada tataran perencanaan maupun pelaksanaan. Dalam hal ini, kemampuan *bargaining* pemerintah terhadap para kiai sangat menentukan.
2. Pemerintah dalam mengambil kebijakan pembangunan, khususnya di kawasan pesantren, harus benar-benar memahami tipologi kiai, melakukan pendekatan yang berbeda, agar kebijakan yang diambil bisa diterima dan berlangsung dengan

baik. Terhadap kiai yang mengambil jalan ketiga, tawar menawar bisa dilakukan, sepanjang ada keuntungan yang bisa diperoleh kiai. Namun terhadap kiai yang memiliki idiologis kuat, maka harus lebih berhati-hati, karena tidak semua tawaran, sekalipun secara ekonomis menguntungkan terhadap kiai tersebut bisa diterima.

Kebijakan pembangunan pada kawasan santri tidak bisa hanya didekati dari sisi ekonomi murni, namun juga harus memperhatikan prinsip sosial dan idiologis, yakni kesalehan dan kemanfaatan bagi masyarakat sekitar. Dalam hal ini, pendekatan selayaknya tidak hanya dilakukan terhadap elite -kiai, perangkat daerah dan desa, melainkan juga warga masyarakat setempat, mengingat mayoritas mereka yang akan merasakan dampaknya, di samping itu daya kritis masyarakat sekitar kini juga semakin nampak

DAFTAR PUSTAKA

Giddens, Anthony, 1979. *Central Problems in Social Theory: Action, Structure, and Contradiction in Social Analysis*. Berkeley and Los Angeles, California: University of California.

-----, 2000. *The Third Way: the Renewal of Social Democracy*. Ketut Arya Mahardika (penerjemah). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Karni, Asrori S., Oktober 2009. *Etos Studi Kaum Santri: Wajah Baru Pendidikan Islam*. Bandung:

Mizan.

Kawakib, A. Nurul, 2009. *Pesantren and Globalisation: Cultural and Educational Transformation*. Malang: UIN Malang.

Oepen, Manfred. dan Wolfgang Karcher, 1988. *Dinamika Pesantren (dampak pesantren dalam pendidikan dan pengembangan masyarakat)*. Sonhaji Saleh (penerjemah). Jakarta: P3M.

Ritzer, George, Douglas J. Goodman, 2008. *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmoderen*. Nurhadi (penerjemah). Yogyakarta: Kreasi Wacana, Cetakan pertama.

-----, 2008. *Teori Sosial Moderen*. Alimandan (alih bahasa). Jakarta: Kencana, edisi keenam.

Spybey, Tony, 1996. *Social Change Development & Dependency*. Cambridge: Polity Pres.

Steenbrink, Karel A, 1994. *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. Jakarta: LP3ES, cet. Kedua.